

## **HUBUNGAN ANTARA FUNDAMENTAL EKONOMI MALUKU UTARA DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN**

Amran Husen<sup>1</sup>,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun  
E-mail : amran.husen@yahoo.co.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bermaksud untuk membuktikan peran perempuan dalam pembangunan serta menguji hubungan kausalitas antara fundamental ekonomi Provinsi Maluku Utara dan peran perempuan dalam pembangunan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Biro Pusat Statistik selama periode 2009-2018. Alat analisis menggunakan Uji Kausalitas Granger. Hasil studi menunjukkan peran perempuan dalam pembangunan Provinsi Maluku Utara masih rendah, dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan peran perempuan di sektor publik. Hasil uji Kausalitas Granger menunjukkan terdapat hubungan searah antara peran perempuan dalam pembangunan dan fundamental ekonomi, bukan hubungan yang timbal balik. Hal ini berarti peran perempuan dalam pembangunan Provinsi Maluku Utara yang meningkat, menyebabkan fundamental ekonomi daerah Provinsi Maluku Utara meningkat.

*Kata kunci: fundamental ekonomi, peran perempuan, granger*

## Latar Belakang

Sasaran pembangunan bukan kue daerah dan pertumbuhan kue namun pembangunan manusianya. Pembangunan berarti tidak ada lagi masalah kemiskinan, pengangguran serta ketimpangan, jika masih ada masalah-masalah tersebut maka sulit dikatakan sudah ada pembangunan. Capaian hasil pembangunan perlu indikator fundamental ekonomi daerah. Indikator fundamental ekonomi daerah yang dimaksud meliputi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita daerah, dan indikator pembangunan manusia (*Human Development Index/HDI*). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan pembangunan manusia yang tinggi pula tidak akan berarti capaian hasil pembangunan. Hal ini disebabkan sasaran pembangunan adalah pembangunan manusia. HDI mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup yaitu; capaian umur panjang dan sehat (angka harapan hidup), angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta kemampuan daya beli terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendapatan.

Temuan (Laura Cabeza-García; Esther B. Del Brio and Mery Luz Oscanoa-Victorio; 2017) di 127 negara menunjukkan bahwa ketika perempuan memiliki akses yang lebih besar pada pendidikan menengah dan pasar tenaga kerja dengan mempertimbangkan faktor kesetaraan, efeknya positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Akses perempuan untuk partisipasi politik juga terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan yang sama di beberapa negara Sub-Sahara Afrika oleh (Dalia Hakura, Mumtaz Hussain, Monique Newiak, Vimal Thakoor, and Fan Yang; 2016) bahwa ketimpangan pendapatan dan gender, termasuk dari pembatasan berdasarkan gender yang legal, secara bersama-sama terbukti negatif dengan pertumbuhan PDB per kapita. Jinyoung Kim, Jong-Wha Lee, and Kwanho Shin (2016) menemukan bahwa peningkatan kesetaraan gender dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mengubah

alokasi waktu wanita dan mempromosikan akumulasi modal manusia.

Artinya salah satu hal penting yang mempengaruhi HDI adalah kualitas hidup perempuan. Apabila kualitas hidup perempuan rendah maka indeks pembangunan manusia juga rendah dan keberhasilan pembangunan rendah. Pembangunan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu 3 prioritas pembangunan. Kualitas hidup dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik, masih rendah, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi dan eksploitasi. Disadari sudah banyak kemajuan yang dicapai dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, yang antara lain ditandai dengan semakin meningkatnya status dan peran perempuan di berbagai aspek kehidupan, tetapi bila dibandingkan dengan kemajuan laki-laki, status dan peran perempuan masih tertinggal. Anggapan bahwa laki-laki lebih bebas serta perbedaan posisi sebagai pemimpin berdampak pada kesempatan perempuan untuk ikut berperan dalam pembangunan.

Data statistik Provinsi Maluku Utara menunjukkan kondisi perempuan Provinsi Maluku Utara 27 persen buta huruf. Angka kematian ibu (AKI) masih tinggi yaitu 1200/100000. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan lajang lebih rendah dibanding laki-laki yaitu 53,10 persen, sementara laki-laki 71,19 persen. Kebanyakan perempuan yang bekerja sebagai buruh (pekerja rendah) dengan pola penggajian yang berbeda dengan laki-laki.

Fakta diatas menunjukkan masalah perempuan dan kesenjangan gender hingga saat ini masih terjadi hampir disemua bidang pembangunan. Tolak ukur untuk melihat keberhasilan peningkatan kesetaraan laki-laki perempuan adalah dengan indeks pembangunan gender (IPG). Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Maluku Utara bahkan secara nasional, angka IPG nya menunjukkan angka yang rendah dan masih berada di bawah angka nasional (*Tabel 1*).

Pada *Tabel 1*, IPG yang rendah menunjukkan masih adanya kesenjangan gender dan kualitas

hidup perempuan di daerah yang masih rendah. Kualitas perempuan yang rendah akan mempengaruhi peran dalam pembangunan dan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia rendah akan mempengaruhi fundamental ekonomi Provinsi

Maluku Utara, untuk itulah penting untuk melakukan penelitian tentang peran perempuan dalam pembangunan serta kausalitas antara indikator fundamental ekonomi daerah dan peran perempuan dalam pembangunan.

TABEL 1. IPM KABUPATEN KOTA DI MALUKU UTARA

Wilayah	Komponen IPM Indeks Pembangunan Manusia									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Halmahera Barat	59.56	60.33	60.71	61.47	62.06	62.97	63.83	64.19	64.54	
Halmahera Tengah	58.42	59.34	59.94	60.89	61.49	62.07	63.05	63.89	64.66	
Kepulauan Sula	57.06	57.98	58.83	59.77	60.18	60.5	61.25	62.04	62.96	
Halmahera Selatan	58.22	58.86	59.5	59.92	60.34	61.26	62.17	62.64	63.39	
Halmahera Utara	61.46	62.31	62.94	63.81	64.18	65.04	66.02	66.52	67.3	
Halmahera Timur	60.06	60.77	61.73	62.71	63.26	63.99	64.92	65.77	66.2	
Pulau Morotai	-	56.63	57.16	57.97	58.34	59.27	59.87	60.71	61.39	
Pulau Taliabu	-	-	-	56.86	57.31	58.26	58.66	59.03	59.67	
Ternate	74.86	75.52	75.81	76.69	77.15	77.64	77.8	78.48	79.13	
Tidore Kepulauan	64.48	64.8	65.42	66.25	66.76	67.45	68.37	69.25	69.89	
Maluku Utara	62.79	63.19	63.93	64.78	65.18	65.91	66.63	67.2	67.76	

Pada Tabel 1, IPG yang rendah menunjukkan masih adanya kesenjangan gender dan kualitas hidup perempuan di daerah yang masih rendah. Kualitas perempuan yang rendah akan mempengaruhi peran dalam pembangunan dan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia rendah akan mempengaruhi fundamental ekonomi Provinsi Maluku Utara, untuk itulah penting untuk melakukan penelitian tentang peran perempuan dalam pembangunan serta kausalitas antara indikator fundamental ekonomi daerah dan peran perempuan dalam pembangunan.

### Tujuan Studi

Penelitian ini mempunyai tujuan menganalisis peran perempuan dalam pembangunan di kabupaten/kota di Maluku Utara serta menguji hubungan kausalitas antara fundamental ekonomi daerah dan peran perempuan dalam pembangunan di kabupaten/kota di Maluku Utara. Konsekuensi dari kualitas proses pembangunan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penempatan manusia sebagai subyek pembangunan menekankan

pada pentingnya pemberdayaan (*empowerment*) manusia, yaitu kemampuan untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki masing-masing individu. Keterkaitan sasaran fundamental ekonomi daerah antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari hasil penelitian (Amin, Mohammad, Veselin Kuntchev, and Martin Schmidt; 2015) mengkonfirmasi bahwa ketimpangan gender yang lebih besar sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi lebih rendah. Namun, hubungan negatif antara ketimpangan gender dan pertumbuhan ini sepenuhnya disebabkan oleh negara-negara yang relatif miskin, dengan negara-negara relatif kaya tidak menunjukkan hubungan yang searah. Temuan yang sama oleh (Romina Kazandjian, Lisa Kolovich, Kalpana Kochhar, and Monique Newiak; 2016) Pertama, kesenjangan gender dalam kesempatan dalam bidang pendidikan bagi perempuan daripada laki-laki, menyebabkan diversifikasi potensi sumber daya manusia yang tersedia dalam suatu ekonomi. Kedua, kesenjangan gender di pasar tenaga kerja menghambat pengembangan

ide-ide baru dengan mengurangi efisiensi tenaga kerja, dan pada akhirnya mereduksi ekonomi suatu negara.

Duflo, E. (2012) meyakini bahwa pemberdayaan perempuan dan pembangunan ekonomi saling terkait erat. Sementara pembangunan itu sendiri akan membawa pemberdayaan perempuan, pemberdayaan perempuan akan membawa perubahan dalam pengambilan keputusan, yang akan berdampak langsung pada pembangunan. Ini menunjukkan bahwa baik pembangunan ekonomi maupun pemberdayaan perempuan menjadi subah kebijakan komprehensif, karena disalah kekuatan ekonomi di level mikro terbangun melalui kemampuan sumberdaya perempuan dalam keluarga.

Pembangunan pemberdayaan perempuan merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia, dan ditujukan untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki. Pembangunan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu prioritas pembangunan. Kualitas hidup dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik, masih rendah, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi dan eksploitasi. Disadari sudah banyak kemajuan yang dicapai dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, yang antara lain ditandai dengan semakin meningkatnya status dan peran perempuan di berbagai aspek kehidupan, tetapi bila dibandingkan dengan kemajuan laki-laki, status dan peran perempuan masih tertinggal (Duflo, E. 2012).

#### **METODE PENELITIAN**

Lokus penelitian ini pada level daerah yaitu kabupaten/kota. Obyek penelitian ini adalah kabupaten/kota yang ada di Maluku Utara yang berjumlah 8 kabupaten dan 2 kota. Secara keseluruhan ada 10 kabupaten/ kota. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain berupa data jadi dalam bentuk publikasi. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, yaitu: Biro Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara, internet

data yang diperlukan: Produk Domestik Regional Bruto, pendidikan terakhir yang ditamatkan tenaga kerja wanita, jumlah wanita yang mengikuti program keluarga berencana, jumlah wanita bekerja di masing-masing bidang, jumlah angkatan kerja wanita. Periode data penelitian ini adalah runtun waktu mulai tahun 2010-2018. Adapun definisi operasional variabel yang digunakan adalah sebagai berikut: Fundamental Ekonomi, yang digunakan sebagai indikator.

Fundamental ekonomi adalah Pertumbuhan ekonomi, yang diukur Produk Domestik regional Bruto (PDRB) berdasar harga konstan 2010. Peran Wanita dalam penelitian ini menggunakan indikator yang digunakan Indrayanti dkk. (2007), ada empat indikator peran wanita yang digunakan *pertama*, tingkat pendidikan diukur dengan jumlah tenaga kerja wanita berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan dan rasio tenaga kerja wanita dan laki-laki berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan. *Kedua*, tingkat kesehatan diukur dengan jumlah wanita yang mengikuti program keluarga berencana dan jumlah wanita pengikut keluarga berencana mandiri. *Ketiga*, peran wanita di sektor public diukur dengan jumlah wanita yang bekerja di berbagai bidang. *Keempat*, potensi ketenagakerjaan diukur dengan jumlah angkatan kerja wanita yang bekerja, rasio angkatan kerja yang bekerja antara wanita dan laki-laki dan jumlah wanita berusaha sendiri.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen/tulisan yang disusun oleh badan/pihak yang dapat dipertanggungjawabkan kevaliditasannya (Kuncoro, 2010), dalam hal ini dokumen tersebut adalah laporan periodik yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik. Untuk menguji hubungan kausalitas antara fundamental ekonomi daerah dan peran wanita digunakan Uji *kausalitas Granger*. Uji Kausalitas dilakukan karena ada tiga kemungkinan arah kausalitas. *Pertama*, variabel X menyebabkan variabel Y, *Kedua*, variabel Y menyebabkan variabel X, *Ketiga*, hubungan timbal balik variable X menyebabkan variabel Y dan pada saat yang

sama variabel Y menyebabkan variabel X (Kuncoro, 2010). Model dasar penelitian yang digunakan dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_t = \sum a_i Y_{t-i} + \sum b_j X_{t-j} + v_t \dots \dots \dots (1)$$

$$X_t = \sum c_i X_{t-i} + \sum d_j X_{t-j} + \mu_t \dots \dots \dots (2)$$

dimana: **Y** adalah fundamental ekonomi daerah; **X** adalah peran wanita; **a,b,c,d** adalah koefisien; **t** adalah waktu; **i, j** adalah 1,2,3...k; **v, μ** adalah *error*.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara tidak sadar peran perempuan saat ini telah banyak mengalami pergeseran termasuk diantaranya peran ekonomi. Pergeseran peran tersebut juga diperkuat oleh adanya perjuangan kaum feminis untuk melakukan kesetaraan gender. Di luar itu semua, karena alasan tertentu sehingga perempuan yang dulu secara ekonomi hanya dianggap sebagai pendamping bagi suami dalam rumah tangga, teman, mitra dan

bahkan ada yang menganggap sebagai peran minor yang menumpang hidup kepada suaminya, kini bergeser menyandang peran sebagai tulang punggung (pencari nafkah) bagi keluarganya. Tentu saja ini tidak bisa dianggap sebagai kemajuan tetapi paling tidak peran ekonomi perempuan saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata khususnya oleh kaum pria (suami).

Pentingnya meningkatkan kesetaraan perempuan dan laki-laki yang berdampak positif terhadap pembangunan daerah. Gambar 4.1 memperlihatkan 63 persen perempuan di Maluku Utara masih berpendidikan rendah (tamat pendidikan sekolah dasar/SD); 24 persen berpendidikan menengah (tamat pendidikan sekolah menengah/ SMA/SMK sederajat), dan baru 13 persen perempuan di Maluku Utara berpendidikan tinggi ( perguruan tinggi/S1).

**Gambar 4. 1**  
**Tingkat Pendidikan Perempuan Maluku Utara tahun 2018**

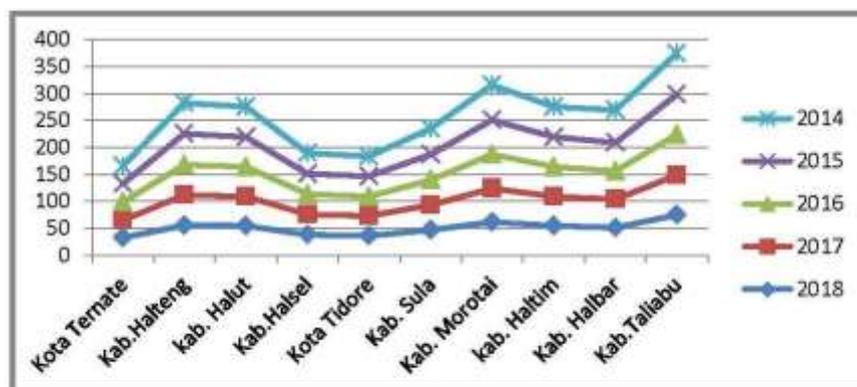


Sumber : BPS Maluku Utara, diolah 2019

Rendahnya pendidikan perempuan ini akan sangat mempengaruhi pembangunan di Maluku Utara sehingga pemerintah Provinsi Maluku Utara harus lebih memperhatikan terhadap kebijakan pendidikan yang lebih serius kedepannya, karena saat ini

pemerintah pusatpun memberikan perhatian serius terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif.

**GAMBAR . 4.2.**  
**PROPORSI PENDIDIKAN RENDAH WANITA MENURUT KAB/KOTA DI**  
**PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014-2018 (%)**



Sumber : BPS Maluku Utara, diolah 2019

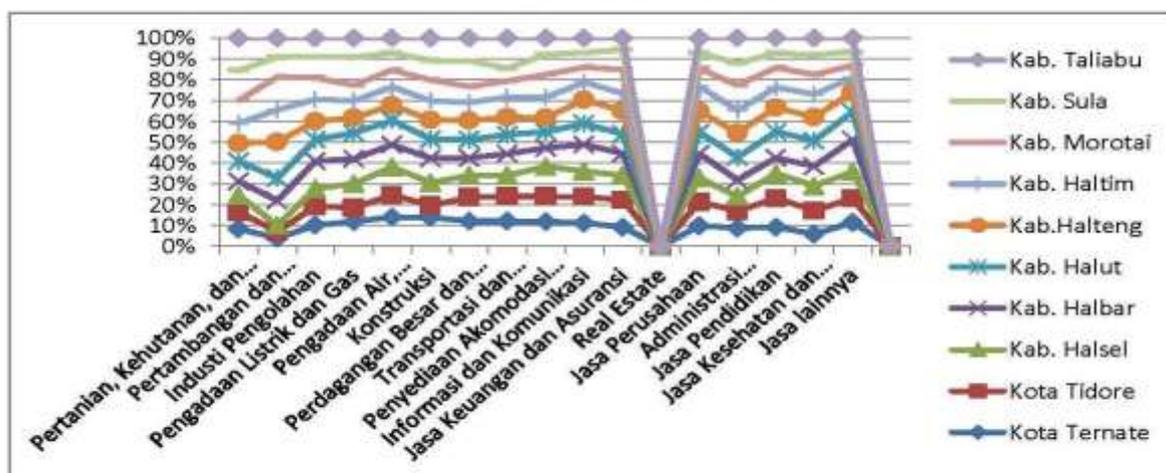
Tahun 2014, kabupaten/kota yang pendidikan wanitanya rendah paling tinggi, berturut-turut adalah kabupaten Taliabu (76,22 persen), kabupaten Morotai (64,58 persen) dan Kabupaten Halteng (57,59 persen). Pada tahun 2015, kabupaten/kota yang pendidikan wanitanya masih ada di Kabupaten Taliabu (75,19 persen), kabupaten Morotai (61,12 persen) dan kabupaten Halteng (57,33 persen). Proporsi pendidikan terendah perempuan di Maluku Utara secara umum menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun, hingga 2018 pendidikan perempuan terus menunjukkan perbaikan, dengan menurunnya persentase perempuan di kabupaten/kota di Maluku Utara. Dilihat dari tingkat pendidikan (*Gambar 4.2*) dapat disimpulkan bahwa di Maluku Utara yang terdiri dari 10 kabupaten/kota pada tahun pengamatan 2014–2018 ada dua kabupaten yang pendidikan wanitanya sangat rendah yaitu kabupaten Taliabu dan kabupaten Morotai, yang penduduk wanitanya lebih dari 60 persen pendidikan rendah. Hal ini terjadi karena di kedua kabupaten tersebut sektor yang menjadi andalan adalah sektor pertanian yang relatif tidak membutuhkan persyaratan pendidikan formal tinggi. Kabupaten Taliabu produk andalannya adalah pertanian hortikultura (sayur-sayuran), dan kabupaten Morotai produk andalannya adalah padi dan jagung. Tahun 2014, kabupaten/kota yang pendidikan wanitanya tinggi, dan paling tinggi, berturut-turut adalah Provinsi Maluku Utara (33,92 persen), kota Tidore (37,28 persen) dan Kabupaten Halmahera Selatan (38,51 persen). Secara konsisten pemerintah kabupaten/kota di

Provinsi Maluku Utara terus mendorong tingkat paertisipasi perempuan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Hingga 2018 persentase pendidikan terendah reus meningkat, dan Provinsi Maluku Utara menempati urutan tertinggi (32,33 persen), menyusul Kota Tidore (36,06 persen) dan kabupaten Halmahera Selatan (37,28 persen). *Gambar 4.2.* dapat disimpulkan bahwa di Maluku Utara yang terdiri dari 10 kabupaten/kota pada tahun pengamatan 2014–2018 ada duakota dan satu kabupaten yang pendidikan wanitanya sangat tinggi yaitu Provinsi Maluku Utara, kota Tidore dan Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini disebabkan Provinsi Maluku Utara secara geografis sebagai pintu gerbang yang notabene kota pelajar sehingga memungkinkan penduduknya untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi terjangkau, sedangkan kota Tidore Kepulauan sebagai kota penyangga kedua setelah Ternate memiliki fasilitas pendidikan yang lebih baik dan memungkinkan masyarakat termotivasi untuk melanjutkan pendidikan pada yang lebih tinggi. Di Maluku Utara tahun 2018, ruang publik yang sudah dimasuki oleh perempuan (*gambar 4.3.*) ada beberapa sektor : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi,

Jasa Keuangan, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Perusahaan, Jasa Lainnya Peran perempuan dalam sektor publik, dapat dilihat dari banyaknya perempuan yang bekerja pada masing-masing bidang lapangan usaha. Pada Gambar 4.3 dapat dilihat proporsi perempuan pada masing-masing bidang. Sektor publik yang paling banyak menyerap perhatian dan peran perempuan rata-rata adalah sektor

pertanian di Maluku Utara (7,94 persen). Kondisi ini adalah wajar karena pada dasarnya sebagian besar wilayah Kabupaten/Kota di Maluku Utara umumnya merupakan daerah agraris. Sejahteranya ini sektor agraris masih menjadi tumpuan utama perekonomian nasional maupun regional, sifatnya fleksibel, serta tidak ada persyaratan khusus (pendidikan formal) untuk memasukinya seakan menjadi peluang besar bagi siapapun untuk bergerak di dalamnya, termasuk kaum perempuan.

**GAMBAR 4.3.**  
**PROPORSI WANITA DI SEKTOR PUBLIK DI**  
**MALUKU UTARA TAHUN 2018**



Sumber : BPS Maluku Utara 2019 diolah

Sektor publik lain yang banyak terisi oleh peranan perempuan kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara adalah perdagangan (6,52 persen), industri (5,91 persen), dan jasa (5,71 persen). Sementara, sektor yang belum banyak tersentuh oleh peran publik wanita adalah: Keuangan (1,7 persen), pertambangan dan galian (1,5 persen), komunikasi (1,4 persen), konstruksi (1,3 persen), dan listrik (1,1 persen) serta lainnya (0,21 persen). Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat pembangunan bidang perempuan yaitu ketenagakerjaan. Indikator ketenagakerjaan yang digunakan adalah banyaknya proporsi perempuan sebagai angkatan kerja yang bekerja dan proporsi perempuan yang bekerja berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada dasarnya penduduk dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu penduduk yang termasuk dalam

kelompok angkatan kerja dan penduduk yang bukan angkatan kerja. Penduduk berumur 10 tahun ke atas dan termasuk dalam kelompok angkatan kerja adalah mereka selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen dan pegawai cuti. Penduduk berumur 10 tahun ke atas dan tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan/mengharapkan dapat pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Penduduk berumur 10 tahun ke atas yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah penduduk yang hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan. Tahun 2014, rata-rata

angkatan kerja perempuan bekerja 73,02 persen, pada tahun 2015 rata-rata angkatan kerja perempuan bekerja 82,8 persen sedangkan pada tahun 2016 sebesar 71,4 persen. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa proporsi angkatan kerja perempuan yang bekerja lebih besar dibandingkan tidak bekerja (sedang mencari pekerjaan).

### HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA INDIKATOR FUNDAMENTAL EKONOMI DAERAH DENGAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

Pengujian hubungan kausalitas antara indikator fundamental ekonomi daerah dengan peranan perempuan dalam pembangunan digunakan uji kausalitas *Granger*. Ada beberapa tahapan dan persyaratan yang dialukan untuk menggunakan alat uji tersebut. Pengujian tersebut berkaitan erat dengan pengujian terhadap kemungkinan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel-variabel ekonomi.

Berkaitan dengan isu tersebut, pengujian terhadap perilaku data runtun waktu (*time series*) atau integrasinya dapat dipandang sebagai uji prasyarat bagi digunakannya pendekatan model dinamis. Untuk itu, pertama-tama harus diamati perilaku data runtun waktu yang akan digunakan stasioner atau tidak. Selanjutnya, apabila diyakini bahwa variabel-variabel yang diamati mempunyai derajat integrasi yang sama, maka dapat diuji residual variabel yang dihasilkan stasioner atau tidak. Berkaitan dengan isu tersebut, pengujian terhadap perilaku data runtun waktu (*time series*) atau integrasinya dapat dipandang sebagai uji prasyarat bagi digunakannya pendekatan model dinamis. Untuk itu, pertama-tama harus diamati perilaku data runtun waktu yang akan digunakan stasioner atau tidak. Selanjutnya, apabila diyakini bahwa variabel-variabel yang diamati mempunyai derajat integrasi yang sama, maka dapat diuji residual variabel yang dihasilkan stasioner atau tidak.

**TABEL 2.**  
**HASIL UJI AKAR-AKAR UNIT VARIABEL PERTUMBUHAN PDRB (*GROWTH*),  
 PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN (*EDU*) DAN ANGGKATAN KERJA YANG BEKERJA (*LF*)**

Variabel	Nilai DF	Nilai ADF
Growth	-12,630*	-2,030**
Edu	1,056	-1,535
LF	-1,617	-1,561

Ket : \*sig pada  $\alpha = 1\%$ , \*\*sig pada  $\alpha = 5\%$

#### Uji Akar-Akar Unit

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel fundamental ekonomi daerah adalah pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan 2010 dari tahun 2012-2018 (*growth*). Sedangkan indikator variabel peran perempuan hanya dilihat dari persentase tingkat pendidikan tinggi yang ditamatkan (*edu*) dan potensi ketenagakerjaan dilihat dari persentase angkatan kerja perempuan yang bekerja (*LF*). Alasan hanya dua indikator yang diambil untuk melihat peran perempuan adalah karena ketidakkonsistenan data sekunder yang ada, ketersediaan data runtun waktu dan tidak stasionernya data pada uji awal. Hasil pengolahan data dengan menggunakan

program Eviews 22, secara ringkas hasil uji akar-akar unit bisa dilihat pada Tabel 2. Uji akar-akar unit menggunakan uji Dickey dan Fuller, kemudian dilihat dari nilai statistik *Dickey-Fuller* (DF) dan *Augmented Dickey-Fuller* (ADF). Pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa hasil uji akar-akar unit untuk variabel *growth* nilai statistik baik nilai DF maupun nilai ADF signifikan artinya data tersebut sudah stasioner, tetapi untuk variabel Edu dan LF belum signifikan artinya belum stasioner sehingga harus dilakukan uji tahap berikutnya yaitu uji integrasi **Uji Integrasi** Uji integrasi dilakukan terhadap variabel Edu dan LF yang pada uji akar unit belum stasioner. Untuk

ringkasnya hasil uji integrasi dapat dilihat pada *Tabel 3*.

**TABEL 3.**  
**HASIL UJI INTEGRASI PERTAMA VARIABEL PENDIDIKAN YANG**  
**DITAMATKAN (EDU) DAN ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA (LF)**

Variabel	Nilai DF	Nilai ADF
Edu	-1,711***	-2,367
LF	-3,055*	-3,066**

Ket : \*sig pada  $\alpha = 1\%$ , \*\*sig pada  $\alpha = 5\%$ , \*\*\* sig pada  $\alpha = 10\%$ ,

Hasil uji integrasi pertama pada *Tabel 3*, menunjukkan bahwa variabel Edu nilai statistic ADF belum signifikan yang berarti belum stasioner, untuk itu harus dilakukan uji integrasi kedua. Secara ringkas dapat dilihat pada *Tabel 4*.

**TABEL 4.**  
**HASIL UJI INTEGRASI PERTAMA VARIABEL**  
**PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN (EDU)**

Variabel	Nilai DF	Nilai ADF
Edu		-9,701

Ket : \*sig pada  $\alpha = 1\%$ ,

Hasil uji akar-akar unit dan integrasi baik integrasi pertama maupun kedua, telah menunjukkan data stasioner, artinya bisa dilanjutkan pada tahap uji berikutnya yaitu uji kointegrasi.

**Uji Kointegrasi** Pengujian terhadap suatu model empiris apakah mempunyai hubungan kointegrasi, maka ada tiga nilai yang perlu diperhatikan, yaitu nilai statistik *Cointegration-Regression Durbin Watson* (CRDW), DF dan ADF. Ketiga nilai tersebut ditaksir dengan regresi kointegrasi dengan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*). Hasil pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 22, untuk ringkasnya dapat dilihat pada *Tabel 5*. Hasil ini menunjukkan bahwa antara *growth* sebagai

indikator fundamental ekonomi daerah dan pendidikan yang ditamatkan perempuan sebagai indikator dari peran perempuan tidak ditemukan adanya pola kausalitas, artinya semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan perempuan tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah meningkat atau sebaliknya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak menyebabkan pendidikan yang ditamatkan perempuan semakin tinggi

**TABEL 5.**  
**HASIL UJI KOINTEGRASI KAUSALITAS VARIABEL**  
**PERTUMBUHAN PDRB (*GROWTH*) DAN PENDIDIKAN**  
**YANG DITAMATKAN PEREMPUAN (*EDU*)**

Variabel Tak Bebas: Growth		Variabel Tak Bebas: Edu	
Variabel Bebas	Nilai Koefisien dan t Statestik	Variabel Bebas	Nilai Koefisien dan t Statestik
Konstanta	2,650 (4,165)	Konstanta	-2,001 (-0,371)
Edu	0,272 (1,706)	Growth	1,142 (1,706)
CRDW=0,540 DF=-1,725 ADF=-2,436		CRDW=0,527 DF=-0,730 ADF=-1,211	

Ket: angka ( ) menunjukkan t statistik

Indikator yang kedua untuk melihat peran perempuan dalam pembangunan adalah potensi ketenagakerjaan yaitu jumlah angkatan kerja perempuan yang bekerja. Hasil pengolahan data dengan program Eviews 22 uji kointegrasi secara ringkas, untuk indikator kedua dari peran perempuan dapat dilihat pada *Tabel 6*. Berdasarkan *Tabel 6*, dapat disimpulkan bahwa dengan  $\alpha = 5\%$  residual persamaan kointegrasi tidak stationer pada derajat 0 yang ditandai dengan tidak signifikansinya nilai CRDW, DF dan ADF secara statistik (nilai CRDW tabel, DF

tabel, ADF tabel masing-masing 0,78; 3,67; 3,29 ) untuk persamaan yang variabel tak bebasnya *growth* dan bebasnya LF. Berdasarkan *Tabel 5*, dapat disimpulkan bahwa dengan  $\alpha = 5\%$  residual persamaan kointegrasi tidak stationer pada derajat 0 yang ditandai dengan tidak signifikansinya nilai CRDW, DF dan ADF secara statistik (nilai CRDW tabel, DF tabel, ADF tabel masing-masing 0,78; 3,67; dan 3,29). Hasil lain menunjukkan persamaan yang variabel tak bebasnya LF dan bebasnya *growth*, nilai statistik CRDW-nya signifikan.

**TABEL 6.**  
**HASIL UJI KOINTEGRASI KAUSALITAS VARIABEL**  
**PERTUMBUHAN PDRB (*GROWTH*) DAN ANGKATAN KERJA**  
**PEREMPUAN YANG BEKERJA (*LF*)**

Variabel Tak Bebas: Growth		Variabel Tak Bebas: LF	
Variabel Bebas	Nilai Koefisien dan t Statestik	Variabel Bebas	Nilai Koefisien dan t Statestik
Konstanta	1,201 (0,450)	Konstanta	2132204 (2,257)
LF	0,0000004 (0,203)	Growth	221215,1 (1,250)
CRDW=0,572 DF=-1,531 ADF=-2,31		CRDW=1,234 DF=-2,137 ADF=-1,261	

Ket: angka ( ) menunjukkan t statistik

Hal ini menunjukkan bahwa antara *growth* sebagai indikator fundamental ekonomi daerah dan angkatan kerja perempuan yang bekerja sebagai indikator dari peran perempuan ditemukan adanya pola kausalitas searah, artinya semakin tinggi angkatan kerja perempuan yang bekerja menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah meningkat tetapi sebaliknya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak menyebabkan angkatan kerja perempuan yang bekerja meningkat. **Uji Kausalitas Granger** Setelah uji akar unit, uji integrasi dan uji kointegrasi, tahapan yang terakhir adalah uji kausalitas Granger. Panjang kelambanan (*lag*) dalam pengujian kausalitas granger ini, ditetapkan masing-masing sebesar 2. Kegunaan uji kausalitas Granger untuk mengetahui hubungan kausal dari dua variabel, apakah hubungan yang timbal balik, searah

atau bahkan tidak ditemukan pola hubungan kausal dalam konteks jangka pendek. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 22, uji kausalitas Granger dapat dilihat pada *Tabel 7*. Berdasarkan *Tabel 7*, ada hubungan kausalitas antara angkatan kerja perempuan yang bekerja sebagai indikator peran perempuan dalam pembangunan dengan pertumbuhan PDRB sebagai indikator fundamental ekonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji kausalitas Granger dengan *null hypothesis* antara LF dan *growth* dengan nilai prob 0,0354 (sig pada nilai  $\alpha = 10\%$ ). Semakin tinggi angkatan kerja perempuan yang bekerja yang berarti peran wanita dalam pembangunan meningkat menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah meningkat yang berarti fundamental ekonomi daerah juga meningkat.

**TABEL 7.**  
**HASIL UJI KAUSALITAS GRANGER VARIABEL PERTUMBUHAN PDRB (GROWTH), PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN PEREMPUAN (EDU) DAN ANGKATAN KERJA WANITA YANG BEKERJA (LF)**

Pairwise Granger Causality Tests			
Sample: 2010 - 2018			
Lags: 2			
Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
GROWTH does not Granger Cause EDU	7	0,00215	0,7736
EDU does not Granger Cause GROWTH		0,22242	0,6027
LF does not Granger Cause EDU	7	0,32131	0,5473
EDU does not Granger Cause LF		2,30672	0,2022
LF does not Granger Cause GROWTH	7	12,3324	0,0353
GROWTH does not Granger Cause LF		3,03245	0,2352

## PEMBAHASAN

### *Peran Perempuan dalam Pembangunan.*

Peran perempuan dalam pembangunan di kabupaten/kota di Maluku Utara dilihat dari indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan masih rendah sekali yaitu 56,44 persen pada tahun 2010. Pendidikan perempuan di Provinsi Maluku Utara, apabila dibandingkan dengan pendidikan penduduk laki-laki yang

ditamatkan pada tahun 2010, untuk pendidikan rendah laki-laki 69,5 persen sedangkan perempuan 55,5 persen. Untuk pendidikan menengah, laki-laki 34,2 persen perempuan 27,5 persen, pendidikan perempuan kategori pendidikan tinggi hanya 2,5 persen sedangkan laki-laki 3,2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan perempuan kabupaten/kota di Maluku Utara masih lebih rendah

dibandingkan laki-laki. Keterbatasan ekonomi masyarakat di Maluku Utara menyadi factor penting yang membuat kesempatan untuk penduduk perempuan tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan dalam keluarga dibandingkan laki-laki. Data angka kemiskinan di Maluku Utara hingga tahun 2018 tercatat 78,28 ribu orang tergolong miskin, dan dari jumlah ini 83,62 persen (68,12 ribu orang) yang miskin ada di desa dan 16,38 persen (10,16 ribu orang) miskin ada di perkotaan (BPS Malut, 2019). Dilihat dari potensi ketenagakerjaan, proporsi angkatan kerja yang bekerja termasuk tinggi, selama periode pengamatan sudah di atas 90 persen, namun apabila dibandingkan dengan angkatan kerja laki-laki yang bekerja, proporsi perempuan masih dibawah laki-laki. Jumlah angkatan kerja perempuan yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai pekerja tak dibayar menempati porsi paling besar yaitu 25,6 persen. Besarnya pekerja yang tidak dibayar menunjukkan bahwa perempuan di kabupaten/ kota Maluku Utara masih lemah dalam hal *bargaining power*. Bekerja hanya sekedar membantu keluarga tanpa dibayar. Kondisi di atas menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pembangunan masih rendah. Hasil penelitian ini mendukung temuan laporan International Labour Office (ILO) 2014 dan 2017 yang menemukan bahwa isu-isu gender, dan bagaimana masalah gender dapat diintegrasikan ke dalam berbagai langkah GEA. Masalah gender yang relevan untuk ditangani dalam berbagai langkah kebijakan. Penting juga bahwa negara-negara memilih beberapa pasar tenaga kerja spesifik gender dan indikator pekerjaan yang layak untuk pemantauan keseluruhan tren pasar tenaga kerja secara umum, tetapi juga lebih tepat untuk pemantauan dan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan nasional. Meskipun terdapat kemajuan substansial dalam mempromosikan kesetaraan jender di dunia kerja, dan pengurangan kemiskinan secara keseluruhan selama 50 tahun terakhir, perempuan terus secara tidak proporsional lebih dipengaruhi oleh defisit pekerjaan yang layak dan kemiskinan daripada laki-laki, dan karenanya

sebagian besar kaum miskin di dunia adalah perempuan. Hasil penelitian berbeda dengan temuan Rahmah (2013) di Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa peran perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mereka kesejahteraan. Hubungan yang dirasakan signifikan antara aktivitas/partisipasi perempuan dalam social kegiatan ekonomi. Peran semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah sangat diperlukan, karena diyakini peran ganda perempuan dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga masyarakat di Sulawesi Tenggara cukup signifikan ***Hubungan Kausalitas Fundamental Ekonomi Daerah dan Peran Wanita dalam Pembangunan***. Pembuktian terhadap hubungan kausalitas antara fundamental ekonomi daerah Provinsi Maluku Utara dengan indikator pertumbuhan PDRB dan peran perempuan dalam pembangunan, ditunjukkan dua indikator yaitu tingkat pendidikan yang ditamatkan perempuan dan banyaknya angkatan kerja perempuan yang bekerja. Uji hubungan kausalitas dengan menggunakan uji kausalitas Granger dimaksudkan membuktikan hubungan kausalitas dalam konteks jangka pendek. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat pola hubungan kausal antara fundamental ekonomi daerah dan peran perempuan terhadap pembangunan khususnya pendidikan yang ditamatkan dan sebaliknya. Namun dalam penelitian ini terbukti hubungan kausal antara peran perempuan dalam pembangunan, khususnya banyaknya angkatan kerja perempuan yang bekerja dengan fundamental ekonomi daerah. Semakin banyak angkatan kerja perempuan yang bekerja, berarti peran perempuan dalam pembangunan meningkat, menyebabkan semakin tinggi pertumbuhan PDRB, artinya fundamental ekonomi daerah meningkat. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Duflo (2012) yang menyimpulkan ada pergeseran peran wanita sebagai peran ekonomi. Pemberdayaan perempuan dan pembangunan ekonomi saling terkait erat. Sementara pembangunan itu sendiri akan membawa pemberdayaan perempuan, pemberdayaan perempuan akan membawa perubahan dalam pembuatan keputusan, yang akan berdampak langsung pada pembangunan. Secara ekonomi dulu wanita hanya dianggap sebagai tulang rusuk

bagi suami dalam rumah tangga yaitu peran sebagai pendamping, teman, mitra, dan bahkan ada anggapan minor yang menumpang hidup kepada suaminya, kini bergeser menyandang peran sebagai tulang punggung (pencari nafkah) bagi keluarganya. Hasil studi dari Fadilah jika diterapkan dalam lingkungan yang lebih luas tidak hanya sebatas keluarga tetapi wilayah regional akan menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu semakin tinggi peran wanita maka fundamental ekonomi daerah akan semakin meningkat.

Peran wanita dalam pembangunan yang meningkat akan menyebabkan fundamental ekonomi daerah yang meningkat senada dengan hasil penelitian Cabeza-García; Del Brio and Oscanoa-Victorio, (2018) bahwa peran yang rendah bagi perempuan memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi. Namun ketika perempuan memiliki akses yang lebih besar ke pendidikan dan pasar tenaga kerja secara berimbang dengan laki-laki, efeknya positif. Begitu pula partisipasi politik yang aktif bagi perempuan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan melalui konsolidasi demokrasi. Pada umumnya wanita yang bekerja mempunyai *bargaining power* dan partisipasi yang semakin tinggi. Tingkat melek huruf yang tinggi, kesehatan yang baik, dan kesamaan kesempatan memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan membantu membangun consensus atas tujuan pembangunan. Temuan yang sama di Afrika Selatan oleh Licumb; Dzator and Zhang (2015) selatan tahun 1970 sampai dengan 2010, menyimpulkan bahwa pendidikan gender diukur dengan rasio anak perempuan dan anak laki-laki dalam pendaftaran sekolah dasar, dan pertumbuhan ekonomi diukur dengan PDB per kapita menunjukkan bahwa ada efek positif kuat dan signifikan dari kesetaraan gender dalam pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menganjurkan ketika terjadi beberapa penyesuaian kebijakan dalam perencanaan pendidikan di wilayah tersebut, ketika kesempatan siswa perempuan meningkatkan kualitas pendidikannya, terbukti positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tujuan pembangunan dalam jangka panjang. Penjelasan diatas membuktikan

ketikan perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, terbukti mampu memberikan kontribusi signifikan untuk ikut serta dalam mengatasi pengangguran dengan cara menciptakan lapangan kerja baru yaitu mengelola usaha kecil menengah dan koperasi. Wanita pelaku usaha ini berarti memiliki peran ekonomi. Peran ekonomi yang semakin tinggi akan meningkatkan fundamental ekonomi daerah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran perempuan dalam pembangunan di kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara masih rendah, dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, peran wanita di sektor publik dan potensi ketenagakerjaannya.
2. Terdapat hubungan searah antara peran perempuan dalam pembangunan dengan fundamental ekonomi daerah, artinya peran perempuan dalam pembangunan yang meningkat, menyebabkan fundamental ekonomi daerah meningkat. Namun tidak terdapat hubungan yang timbal balik antara keduanya dalam studi ini.

### **B. SARAN**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Perlu peningkatan peran perempuan dengan memberikan kesempatan lebih luas perempuan memperoleh pendidikan tinggi, pelayanan umum dan informasi kesehatan wanita, penyediaan lapangan kerja wanita di sektor publik.
2. Uji Kausalitas Granger hanya digunakan sebagai analisis jangka pendek, untuk keperluan arah kebijakan perlu menguji hubungan antara fundamental ekonomi daerah dan peran perempuan dalam pembangunan jangka panjang, dengan alat analisis lainnya seperti uji kausalitas model koreksi kesalahan baku, yang tidak memerlukan persyaratan data stasioner bagi data times series.

## REFERENSI

- Amin, Mohammad, Veselin Kuntchev, and Martin Schmidt. 2015. "Gender Inequality and Growth: The Case of Rich vs. Poor Countries." World Bank Policy Research Working Paper; 7172, World Bank, Washington.
- Brashaw, S.; Castellino, J.; Diopet, B. Women's Role in Economic Development: Overcoming the Constraints. Sustainable Development Solutions Network. 2013. Available online: <http://unsdsn.org/resources/publications/womens-role-in-economic-development-overcoming-the-constraints/> (accessed on 4 December 2017).
- Cuberes, D.; Teignier, M. Gender Inequality and Economic Growth. World Development Report. 2012. Available online: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4391> (accessed on 10 July 2014).
- Duflo, E. 2012. "Women Empowerment and Economic Development," *Journal of Economic Literature* 50(4): 1051-1079.
- Fadilah, S. 2010. Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita dari Tulang Rusuk menjadi Tulang Punggung, *Jurnal Kajian Gender (JKG)*, Vol.1 No.1, hal 159-169.
- Hakura, D.; Hussain, M.; Newial, M.; Thakoor, V.; Yang, F. Inequality, Gender Gaps and Economic Growth: Comparative Evidence for Sub-Saharan Africa; IMF Working Paper No. 111; International Monetary Fund: Washington, DC, USA, 2016.
- Licumba, E.A.; Dzator, J.; Zhang, J.X. Gender Equality in Education and Economic Growth in Selected Southern African Countries. In Proceedings of the Australasian Conference on Business and Social Sciences, Sydney, Australia, 13–14 April 2015.
- Licumb; Dzator and Zhang. 2015. Gender Equality in Education and Economic Growth in Selected Southern African Countries. roceedings of the Australasian Conference on Business and Social Sciences 2015, Sydney(in partnership with The Journal of Developing Areas) ISBN 978-0-9925622-1-2
- Romina Kazandjian, Lisa Kolovich, Kalpana Kochhar, and Monique Newiak. 2016. Gender Equality and Economic Diversification. WP/16/140. African Department, Human Resource Department, and Strategy, Policy, and Review Department.
- Sriani Ameratunga Kring. Gender in employment policies and programmes: What works for women?. Employment Policy Department Employment Working Paper no.235. 2017. rinted by the International Labour Office, Geneva, Switzerland
- The Gender Divide in Skills Development: progress, challenges and policy options for empowering women (2014) [http://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS\\_244380/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_244380/lang--en/index.htm)